Canda Puan Maharani Soal Nama Duet Ganjar-Mahfud: Katanya Gofud

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani berseloroh soal singkatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan.

Seperti diketahui, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan nama Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo.

Menurut Puan, nama Ganjar dan Mahfud bila disingkat bisa menjadi Gofud.

"Saya baru baca tadi di WA grup, katanya Gofud. Iya enggak sih Gofud. Jadi belum diputusin. Nanti kita putusin," kata Puan saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (18/10).\

Selain itu, Puan juga menyebut kemungkinan nama lain yang bisa digunakan untuk memperkenalkan pasangan Ganjar-Mahfud, yaitu GaMa. Meski demikian, ditegaskannya belum ada nama-nama yang pasti untuk duet Ganjar-Mahfud.

"Nanti itu akan jadi satu keputusan kita akan bicarakan bersama-sama," jelasnya.

Sebelumnya, nama Ganjar-Mahfud telah resmi dideklarasikan oleh koalisi PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura sebagai pasangan capres-cawapres. Rencananya, koalisi ini akan mendaftarkan pasangan ini ke KPU pada Kamis (19/10), hari ini sekitar pukul 11.00 WIB. ● **han**

Eksepsi Ditolak, Pemeriksaan Perkara Pengacara Enembe Lanjut

JAKARTA (IM) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan advokat Stefanus Roy Rening, terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan atau *obstruction of justice* perkara suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menilai, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi keberatan kubu Roy Rening sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian, keberatan kubu Roy Rening tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

"Mengadili, menyatakan nota keberatan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa Stefanus Roy Rening tidak dapat diterima," kata hakim Pontoh dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Rabu (18/10).

Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan PN Tipikor Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili yang perbuatan pidana didakwakan jaksa KPK terhadap Roy Rening.

Hakim Pontoh menyebutkan, surat dakwaan penuntut umum telah cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan peraturan Pasal 143 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, hakim memerintahkan jaksa komisi antirasuah untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Roy Rening sebagaimana surat dakwaan.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi nomor 84/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Stefanus Roy Rening berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut," kata hakim Pontoh.

Dalam nota keberatanya, kubu Roy Rening menilai, jaksa KPK membuat dakwaan perintangan penyidikan atau *obstruction of justice* terhadap kliennya secara ujuk-ujuk atau tiba-tiba.

Selain itu, kubu Roy Rening menilai perkara yang menjerat kliennya juga dipaksakan untuk dibawa ke proses hukum.

Mereka berdalih tindakan yang dilakukan Roy Rening hanya menjalankan profesi advokat untuk membeli kliennya demi menegakkan keadilan berdasarkan hukum.

"Perkara a quo dipaksakan ada berdasarkan penggalan-penggalan fakta yang tidak jelas konteksnya dan berdasarkan tafsir penyidik atas frase itikad baik yang sewenang-wenang tanpa parameter yang jelas sekedar untuk mencocok-cocokan unsur delik," papar tim penasihat hukum Roy Rening dalam nota keberatannya, Rabu (4/10) lalu. ● **han**

IDN/ANTARA

PERTEMUAN KAESANG PANGAREP DENGAN AIRLANGGA HARTANTO

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) saat melakukan pertemuan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (18/10). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi politik jelang Pemilu Capres-Cawapres 2024.

Mahfud MD akan Bereskan Setengah Persoalan Bangsa Lewat Penegakan Hukum

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas," ujar Mahfud.

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD resmi ditunjuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden, Rabu (18/10).

Mahfud menegaskan, bersama Ganjar akan memberantas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Terlebih, terkait masalah hukum.

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas," ujar Mahfud di DPP PDIP, Rabu (18/10).

Menurut Mahfud, aspek hukum bagi sebuah bangsa sangatlah penting. Sebab, bila perkara hukum di Indonesia dibenahi hal tersebut akan mampu mendongkrak sisi sosial, keamanan hingga ekonomi bangsa.

"Kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga misalnya di bidang sosial politik budaya pertahanan keamanan dan ekonominya," katanya.

"Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat," katanya.

Diketahui, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Perindo, Ganjar Pranowo resmi menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD sebagai Calon Wali Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam deklarasinya di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Ganjar Pranowo adalah prof Mahfud MD," ujar Megawati di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Jumlah Harta

Sebagai penyelenggara negara, Mahfud diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu berapa kekayaan Mahfud MD?

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 2022, Mahfud MD memiliki kekayaan total sekitar R-29,5 miliar, tepatnya Rp29.546.144.177. Angka tersebut terbagi dalam harta tanah dan bangunan Rp12.060.316.000 (Rp12 miliar) serta alat transportasi dan mesin Rp1.503.000.000.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp180.500.000 (Rp180 juta) serta kas dan setara kas Rp15.802.328.117 (Rp15 miliar). ● **han**

TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Johnny G Plate Berikan Honor Tambahan kepada Stafsusnya hingga Rp1,5 Miliar

JAKARTA (IM) - Dedy Permadi yang merupakan Staf Khusus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, mengaku, menerima honor tambahan hingga Rp1,5 miliar. Uang itu diterimanya melalui sekretaris pribadinya, Heppy Endah Palupy.

Hal ini diungkap Dedy saat bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo dengan terdakwa eks Menkominfo Johnny G Plate, eks Dirut BAKTI Anang Achmad Latif, dan Kepala Hudev UI, Yohan Suryanto.

Awalnya, Hakim Ketua Fahzal Hendri menanyakan saksi apakah pernah menerima titipan dari Happy. Dedy menjawab dirinya pernah menerima transferan uang dari Heppy.

"Kapan itu Pak?," tanya Hakim.

"Dimulai Maret 2021, tapi pembicaraannya sudah sejak Desember 2020," jawab saksi.

Pembicaraan yang dimaksudnya adalah ketika dirinya diminta menghadap Johnny G Plate ke ruangannya. Namun, ia tidak ingat kapan tanggal pertemuan tersebut.

"Beliau menyampaikan bahwa akan memberikan honor tambahan karena saya sudah bekerja banting tulang untuk membantu beliau," kata Dedy.

Setelah pertemuan itu, Dedy menyatakan tidak langsung menerima honor tambahan. Singkat cerita, Dedy menyebutkan kembali dipanggil Johnny pada Februari 2021.

Pada Februari 2021 itu, kata Dedy, Johnny menjelaskan yang akan mengurus honor tambahan untuknya adalah Heppy.

"Februari (2021) saya dipanggil ke ruangan beliau hanya berdua. Kemudian beliau menyampaikan 'honor tambahan yang dulu saya pernah sampaikan sudah akan mulai diberikan ke kamu, yang akan mengurus Heppy'," ujar Dedy.

Kemudian, hakim menanyakan soal asal anggaran untuk honor tambahan Dedy. Saksi mengaku sempat menanyakan hal tersebut kepada Johnny. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban.

"Anggarannya dari mana itu?" kata hakim.

"Nah, itu yang langsung saya tanyakan Yang Mulia, saya sampaikan 'izin Pak Menteri saya kalau dapatkan honor tambahan harus jelas asalnya, harus legal. Saya tidak mau kalau tidak jelas atau tidak legal'. Saya sampaikan sejak saya diberi tahu akan mendapatkan," jawab saksi.

"Apa jawab beliau?," tanya Fahzal lagi.

"Ya nanti diurus Ibu Heppy," jawab Saksi menirukan ucapan Johnny G Plate.

Soal asal anggaran, Dedy kembali tanyakan hal tersebut kepada Heppy. Namun, ia juga tak mendapat jawaban.

"Maret 2021 baru saudara menerima?," tanya Hakim soal penerimaan honor tambahan Dedy.

"Betul, saya ditransfer Bu Heppy," ujar saksi.

Dedy melanjutkan, ia menerima uang berkisar Rp60-100 juta. Nominal itu ia terima sebanyak 22 kali.

Dedy mengaku, menerima honor tambahan itu setiap bulan dari Maret 2021 hingga Juli 2022. Jika ditotal, menurut Dedy, dirinya menerima honor tambahan senilai Rp1,5 miliar.

"Kesemuanya itu berapa diakumulasikan, berapa?," tanya Fahzal.

"Sekitar Rp1,5," jawab Dedy.

"1,5 miliar?," cecar Hakim.

"Betul," jawab saksi. ● **han**

PANN Maritime Finance

LAPORAN KEUANGAN

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Jl. Cikini IV No.11, Jakarta 10330
Tlp. +6221-31922003/31522933, Fax. +6221-31922980
www.pannmaritim.com

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
ASET		
Kas dan setara kas	8.916.708.247	8.457.977.859
Piutang sewa pembiayaan - bersih	358.786.227.425	366.363.161.067
Tagihan anjak piutang - bersih	-	-
Piutang lain-lain - bersih	764.966.912	764.966.908
Beban dibayar dimuka dan uang muka - bersih	550.556.621	64.020.000
Penyertaan saham	29.220.518.811	29.220.518.811
Aset hak guna -bersih	-	960.961.080
Aset tetap - bersih	280.205.381	165.456.600
Aset pajak tangguhan	16.946.444.827	16.913.268.534
Aset lainnya	394.689.377.077	421.731.467.955
JUMLAH ASET	810.155.005.301	844.641.798.814
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Pinjaman bank	72.613.305.734	115.488.927.764
Uang muka lain-lain yang diterima	11.397.261.534	10.218.731.705
Beban akrual	2.705.095.272	1.506.945.737
Utang pajak	183.920.610	126.349.281
Liabilitas sewa	-	1.094.017.752
Utang kepada pihak berelasi	90.433.249.596	75.007.247.695
Liabilitas imbalan pasca-kerja	533.062.937	350.354.881
JUMLAH LIABILITAS	177.865.895.683	203.792.574.815
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, Modal dasar 2.500.000, ditempatkan dan disetor sebanyak 1.315.061 saham	1.315.061.000.000	1.315.061.000.000
Agio saham	87.689.682.472	87.689.682.472
Cadangan lain	336.511	336.511
Defisit	(770.461.909.365)	(761.901.794.984)
JUMLAH EKUITAS	632.289.109.618	640.849.223.999
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	810.155.005.301	844.641.798.814

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
PENDAPATAN		
Sewa pembiayaan	8.650.092.552	8.206.251.067
Lain-lain	1.738.666.812	78.661.862.084
Jumlah Pendapatan	10.388.759.364	86.868.113.151
BEBAN		
Pegawai	(8.395.257.807)	(9.852.971.423)
Fasilitas kerja	(2.988.801.093)	(2.644.161.905)
Pengembangan operasi	(1.707.295.313)	(1.909.426.884)
Penyusutan	(67.614.219)	(68.945.300)
Bunga	(2.901.737.975)	(4.818.355.480)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.335.394.716)	(3.052.318.923)
Lain-lain	(1.533.430.792)	(97.262.968)
Jumlah Beban	(18.929.531.915)	(22.443.442.883)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(8.540.772.551)	64.424.670.268
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	21.622.306 -	(38.202.107.404)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(8.519.150.245)	26.222.562.864
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Penghasilan komprehensif lain	(52.518.123)	65.688.732
Pajak terkait	11.553.987	(14.451.521)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(40.964.136)	51.237.211
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(8.560.114.381)	26.273.800.075

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari:		
Transaksi pembiayaan	45.936.023.364	39.180.223.762
Pendapatan bunga	768.654.233	1.591.133.878
Pembayaran kas untuk:		
Transaksi pembiayaan	(12.200.000.000)	(15.000.000.000)
Beban operasional	(14.089.073.355)	(13.860.635.158)
Beban keuangan	(1.002.703.001)	(4.727.452.064)
Pajak penghasilan	(2.581.794.047)	(1.301.171.151)
Penerimaan (Pembayaran) lainnya	48.308.255.775	5.484.096.201
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	65.139.362.969	11.366.195.468
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pelunasan pembelian aset tetap	-	(121.056.527)
Pembelian aset tetap	(182.363.000)	-
Penempatan Deposito	(12.560.771.763)	
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(12.743.134.763)	(121.056.527)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran pinjaman bank	(51.947.405.239)	(27.523.287.008)
Pembayaran liabilitas sewa	-	(220.000.000)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(51.947.405.239)	(27.743.287.008)
PENURUNAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	448.822.967	(16.498.148.067)
PENGARUH SELISIH KURS ATAS KAS DAN SETARA KAS	9.907.421	47.004.975
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	8.457.977.859	24.909.120.951
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	8.916.708.247	8.457.977.859

PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Agio Saham	Cadangan lain	Defisit	Jumlah
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	1.315.061.000.000	87.689.682.472	336.511	(788.175.595.059)	614.575.423.924
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	26.273.800.075	26.273.800.075
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	1.315.061.000.000	87.689.682.472	336.511	(761.901.794.984)	640.849.223.999
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(8.560.114.381)	(8.560.114.381)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	1.315.061.000.000	87.689.682.472	336.511	(770.461.909.365)	632.289.109.618

Catatan:

1. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,Aryanto,Mawar dan Rekan (a member of the RSM network) dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material
2. Kurs penutupan untuk tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp.15.731,-

Jakarta, 2 Oktober 2023
PT.PANN Pembiayaan Maritim

S.E & O

Direksi

Parpol Diminta Patuhi Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pilpres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia calon presiden-calon wakil presiden melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Senin (16/10) kemarin.

"(Putusan MK) kan sudah berlaku, bahkan rumusan normanya sudah dirumuskan MK. Kita ikuti saja rumusan yang dirumuskan dalam amar putusan MK tersebut," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (18/10).

Sebagai tindak lanjut, KPU RI menyurati pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 untuk mempedomani substansi putusan MK tersebut, khususnya soal bunyi pasal yang diubah terkait dengan syarat usia capres-cawapres. "(Surat akan disampaikan) hari ini," kata Hasyim.

Tindakan ini sedikit berbeda dengan pernyataan KPU RI sebelumnya bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu berniat melakukan revisi secara cepat dengan ataupun tanpa rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI. Rapat konsultasi itu memang wajib ditempuh dalam penyusunan PKPU walau keputusan rapat itu tak mengikat KPU RI. Namun, saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menyampaikan bahwa PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diundangkan sebelum putusan MK telah mengatur ketentuan teknis untuk capres/cawapres dari unsur kepala daerah.

Dalam putusan MK, majelis hakim memutuskan bahwa kepala daerah bisa ikut mencalonkan diri sebagai capres-cawapres sebagai syarat alternatif dari ketentuan usia minimum 40 tahun.

"Frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' sudah termaktub dalam Pasal 13 Ayat 1 huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," kata Idham kepada wartawan, Rabu (18/10). ● **mei**